

**Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif *Siyasah Syar'iyah***

Aziza Aziz Rahmaningsih<sup>1</sup>, Elfa Murdiana<sup>2</sup>, Umniyatus Selviana<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negri Metro, Lampung<sup>123</sup>

[Azizahazizrahmawati012@gmail.com](mailto:Azizahazizrahmawati012@gmail.com),<sup>1</sup> [Elfamurdiana@gmail.com](mailto:Elfamurdiana@gmail.com)<sup>2</sup>

[Umiyatus1116@gmail.com](mailto:Umiyatus1116@gmail.com)<sup>3</sup>

---

Article Info	ABSTRAK
<p><b>Article history:</b></p> <p>Received 28 Desember 2022</p> <p>Revised 28 Desember 2022</p> <p>Accepted 28 Desember 2022</p>	<p>Perempuan menjadi isu yang sering menjadi perbincangan publik. Peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat bukan hanya sebagai proses pembangunan, tetapi juga sebagai fondasi berstruktur kuat, Pemimpin adalah seorang yang memimpin sebuah Wilayah. Di dalam memimpin Wilayah seorang pemimpin harus mempunyai ilmu kepemimpinan. Hasil dari Penelitian menunjukkan peran kepemimpinan perempuan di Kecamatan Metro Pusat adalah memberikan pelayanan dan Kebijakan yang baik kepada masyarakat sesuai dengan visi-misi Kecamatan Metro Pusat terutama tentang E-service yang memberikan pelayanan secara elektronik dalam artian bahwa kecamatan Metro Pusat sudah dapat memberikan pelayanan yang bebas berbasis elektronik sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat yaitu sesuai dengan tujuan <i>Siyasah syar'iyah</i> yaitu kepemimpinan yang menuju pada kemaslahatan baik dunia maupun di akhirat.</p> <p><i>Kata Kunci:</i> Kepemimpinan Perempuan, <i>Siyasah syar'iyah</i></p>
<p><b>Keywords:</b></p> <p>Women's Leadership, <i>Siyasah syar'iyah</i></p>	<p><i>Abstract</i></p> <p><i>Women are an issue that often becomes a public discussion. The role of women in social life is not only as a development process, but also as a strong structural foundation. A leader is someone who leads a region. In leading the territory of a leader must have the knowledge of leadership. The results of the study show that the role of leadership in the Central Metro District provides good services and policies to the community in accordance with the vision and mission of the Central Metro District, especially regarding E-services that provide services electronically in This means that the Central Metro sub-district is already able to provide services that are free electronically based so that it makes it easier for the public to obtain fast and precise services, which is in accordance with the goals of <i>Siyasa Syar'iyah</i>, namely leadership that leads to benefit both in this world and in the hereafter.</i></p>

---

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



## **A. Pendahuluan**

Kepemimpinan perempuan menjadi isu yang sering menjadi perbincangan publik. Peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat bukan hanya sebagai proses pembangunan, tetapi juga sebagai fondasi berstruktur kuat. Jika melihat peran wanita tradisional yang selalu diberi batasan dipaksa menikah dan dilarang berpendidikan yang tinggi. Pemimpin dalam kepemimpinannya harus mengacu pada sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Indonesia merupakan Negara hukum. Kepemimpinan seorang pemimpin diwilayahnya haruslah berlandaskan konstitusional. Dalam hal ini ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila dan hukum tertingginya adalah UUD 1945.

Pemimpin adalah seorang yang memimpin sebuah Wilayah. Di dalam memimpin Wilayah seorang pemimpin harus mempunyai ilmu kepemimpinan. Ilmu kepemimpinan bagi seorang pemimpin merupakan kewajiban yang harus dipelajari dan dipahami olehnya. Beberapa contoh peran kepemimpinan di atas pentingnya Wilayah atau Negara harus memiliki jiwa kepemimpinan yang menerapkan norma-norma hukum. Kepemimpinan dalam memimpin mengacu pada sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.

Kemaslahatan bisa dicapai dengan berbagai cara. *Siyasah syar'iyah* merupakan salah satu alternatif untuk menggapai kemaslahatan. Pada prinsip-prinsip *siyasah syari'ah* mengelola masalah-masalah yang terkait dengan pemerintahan Islam yang menjamin akan terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kedaratan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.

Allah SWT mensyariatkan hukum serta mencari kemaslahatan yang ada untuk menolak sebuah kemafsadatan. Kemafsadatan sendiri bentuknya bermacam-macam. Dalam sistem ketatanegaraan kemafsadatan sering kali terkait korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal banyak tindakan preventif yang sering dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian perlu adanya suatu alternatif baru untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan yang baik. Salah satu alternatif dalam menentukan maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari administrasi negaranya (*Siyasah idariyah*). *Siyasah idariyah* merupakan bagian dari *siyasah syari'iyah*. Pada zaman Nabi Administrasi Negara (*Siyasah idariyah*) diatur langsung oleh Nabi Muhammad SAW karena pada zamanya, Nabi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dengan diangkatnya Zaidibn Tsabit

sebagai sekretaris Negara untuk mencatat berbagai perihal ketatanegaraan.<sup>1</sup> Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat diangkatlah Abu Bakar Ash Sidiq sebagai kepala negara dan Abu Bakar juga telah mengangkat beberapa sahabat untuk ikut serta dalam mengelola ketatanegaraan negara. Hal demikian terus dilakukan oleh para khulafaurosyidin yang terakhir pada masa Ali bin Abi Talib. Dalam sejarahnya *Siyasah idariyah* sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana masih dipakai sampai sekarang bahkan dalam dunia yang modern.<sup>2</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis peran kepemimpinan perempuan di Kecamatan Metro Pusat, terutama dalam penerapan kebijakan berbasis elektronik (E-service) yang mendukung visi-misi kecamatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan dokumentasi kebijakan terkait. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive, fokus pada pemimpin perempuan dan masyarakat yang merasakan dampak kebijakan E-service. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik untuk memahami kontribusi kepemimpinan perempuan terhadap kemaslahatan masyarakat, sesuai dengan konsep *Siyasa Syar'iyah*. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kepemimpinan Perempuan**

Kepemimpinan merupakan pengalaman manusia yang rasional dan emosional. Kepemimpinan meliputi tindakan dan pengaruh berdasarkan atas alasan dan logika disamping berdasarkan inspirasi dan keinginan. Situasi kepemimpinan sangat kompleks karena orang berbeda pemikiran, perasaan, harapan, impian, kebutuhan, ketakutan, tujuan, ambisi, kekuatan, dan kelemahan. Sebab orang rasional dan emosional. Para pemimpin dapat mempergunakan teknik-teknik rasional atau permintaan emosional untuk memengaruhi para pengikut. Akan tetapi, pemimpin juga harus mengukur konsekuensi dari tindakan rasional dan emosionalnya. Kepemimpinan yang baik adalah lebih dari pada sekadar kalkulasi dan perencanaan. Walaupun analisis rasional dapat mengembangkan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik juga

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratmama), hlm. 34.

<sup>2</sup> M Iqbal, *Fiqih Siyasah*.(Jakarta: Gaya Media Pratmama), hlm. 3

meliputi menyentuh perasaan pengikut, dan emosi memainkan peran penting dalam kepemimpinan.<sup>3</sup>

Teori kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi teori deskriptif dan teori preskriptif. Teori deskriptif adalah teori yang melukiskan hakikat, definisi, arti atau makna sesuatu. Misalnya, teori deskriptif menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan, kepengikutan dan mempengaruhi. Teori preskriptif adalah teori yang memberikan preskripsi, cara melakukan, model-model melakukan sesuatu. Misalnya bagaimana cara memimpin; bagaimana caranya mempengaruhi pengikut.<sup>4</sup>

Kepemimpinan juga dimaknai sebagai proses mempengaruhi tidak hanya dari pemimpin kepada pengikut atau satu arah melainkan timbal balik atau dua arah. Pengikut yang baik juga dapat saja memunculkan kepemimpinan dengan mengikuti kepemimpinan yang ada dan pada derajat tertentu memberikan umpan balik kepada pemimpin. Pengaruh adalah proses pemimpin mengkomunikasikan gagasan, memperoleh penerimaan atas gagasan, dan memotivasi pengikut untuk mendukung serta melaksanakan gagasan tersebut lewat perubahan.

Salah satu keutamaan ajaran Islam adalah memandang manusia secara setara dengan tidak membeda-bedakannya berdasarkan kelas sosial (kasta), ras, dan jenis kelamin. Dalam Islam, yang membedakan seseorang dengan yang lain adalah kualitas ketaqwaannya, kebajikannya selama hidup didunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkannya setelah ia meninggal (Q.S.. Al-Hujurat 49: 13)

Pemimpin memiliki makna dan cakupan yang sangat luas. Ia bisa menjadi pemimpin pemerintahan, pemimpin pendidikan, pemimpin keluarga dan pemimpin untuk diri sendiri. Yang lebih penting dari makna kepemimpinan adalah bahwa manusia memiliki tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Sebagaimana hadist Nabi: masing-masing kamu adalah pemimpin. Dan masing-masing kamu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya (Hadis Riwayat Ibn Abbas. Berangkat dari konsep ini, tidak ada satu konsep pun dalam Al-Qur'an yang membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin. Bahkan alquran mendorong manusia untuk menjadi pemimpin.

## **2. Kepemimpinan dalam Sistem Ketatanegaraan**

---

<sup>3</sup> Wirawan, *Kepemimpinan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2020).

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 109.

Tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, *bonum publicum*. Dalam konstitusi UUD 1945 (preamble) dituliskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.... Untuk meraih cita-cita negara, dibutuhkan pemerintah yang akan menggerakkan negara untuk melaksanakan program-program yang akan mencapai kebahagiaan rakyat. Oleh karenanya, dibutuhkan seorang pemimpin negara/pemerintahan yang visioner dan kompatibel dengan tujuan sebuah negara.

Minimal ada 2 (dua) teori yang dapat dijadikan argumentasi secara umum tentang terciptanya pemimpin negara dengan segenap kekuasaannya atas rakyat;

- a. Teori kontrak sosial John Locke dan JJ.Rousseau adalah dua tokoh yang paling dikenal dengan teori kontrak sosial ini. Asumsi dari teori ini adalah bahwa suatu kesepakatan yang telah ditandatangani antara pemimpin suatu masyarakat dengan rakyatnya. Kesepakatan tersebut menetapkan bahwa sang pemimpin akan mempergunakan kekuasaannya untuk mewakili kehendak seluruh warga negaranya.
- b. Teori kekuasaan absolut Thomas Hobbes dan Friedrich Hegel adalah pendukung teori ini. Mereka mengatakan bahwa individu telah menyerahkan segala haknya kepada sang pemimpin pada waktu menerima kepemimpinannya. Sesungguhnya teori ini memiliki banyak pendukung walaupun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Dalam Islam, pemimpin dan kepemimpinan dapat dikatakan sebagai keharusan ilahiyah dan nubuawah. Pada masa awal Islam datang, pemimpin dan kepemimpinan adalah kehendak ilahiyah. Nabi Muhammad sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Madinah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Allah untuk menjadi pemimpin umat bagi seluruh manusia di dunia. Pada tataran mikro dipahami oleh sebagian manusia sebagai pemimpin bagi umat Islam. Justru pada tataran mikro ini, kajian kepemimpinan Nabi Muhammad dan Negara Madinah menjadi menarik dan layak menjadi kajian sepanjang sejarah manusia.

Seiring berkembangnya zaman, pemikiran kaum muslimin terhadap keberadaan pemimpin negara semakin berkembang pula. Jadi keberadaan pemimpin negara yang diperoleh dari partisipasi rakyat dalam memilihnya, secara sosiologis akan mendapatkan dukungan yang besar dari rakyat. Rakyat memberikan legitimasinya kepada pemimpin negara untuk membawanya kepada kesejahteraan dan kemajuan. Pemimpin negara yang mendapatkan dukungan dari rakyat akan

memiliki otoritas penuh untuk mem-bawa rakyat sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dukungan sosiologis akan tambah kuat bila sesuai dengan konstitusi ne-gara dan peraturan perundangan yang diakui oleh seluruh warga negara.<sup>5</sup>

### 3. Siyasah Syar'iyah

Secara Harfiah Al siyasah berasal dari kata mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Oleh karena itu berdasarkan pengertian arfiah, kata *as siyasah* berarti pemerintahan, mengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan dan arti lainnya. Al siyasah dapat diartikan Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahansi pengertian *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara*. Sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menakrifkan: *siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukannya*.<sup>6</sup>

Berdasarkan pembahasannya atas ayat 58 dan 59 surat an-Nisa, Ibn Taymiyah mengisyaratkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses *siyasah*. *ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (an-Nisa: 58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil, sedangkan ayat kedua (an-Nisa: 59) berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun non militer*<sup>7</sup>

*Siyasah* adalah kepemimpinan yang menuju pada kemaslahatan baik dunia maupun di akhirat. Dalam mekanismenya *siyasah syar'iyah* mengacu pada pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan ke hikmahan.

*Siyasah syar'iyah* menurut batasan Ahmad Fathi Bahansi, adalah pengaturan kemaslaatan manusia sebagai *syara*.<sup>8</sup> Penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam *syara* secara *manthuq* suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam *syara* secara *mafhum*.

---

<sup>5</sup> Farkhani, *Hukum Tata Negara*, Solo: Pustaka iltizam, 2016, hlm. 115.

<sup>6</sup> *Ibn Al-Qayyim al-Jawziyyah*, t.t.

<sup>7</sup> *Ibn Taymiyah, Al-siyasah al syar'iyah fi ashalah al-Ra'y wa Ra'iy, Dar al-kitab al-'Arabi, Mesir, tt., 4., t.t.*

<sup>8</sup> Bahansi, Ahmad Fathi, *Al-Siyasah al-jinaiyah fi al-syariat al-Islamiyah, Dar al-'Arubah*, t.t.

Pernyataan bahwa dalam penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan apa yang dimaksud secara tersurat dalam *syara'* saja meskipun merupakan kebutuhan fundamental.<sup>9</sup>

#### **4. Kepemimpinan Perempuan Dalam Siyasah Syar'iyah**

Islam adalah agama yang moderat, Islam memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Dalam hal tertentu kedudukan laki-laki dan perempuan sudah setara untuk menentukan dan mengembangkan karir dan kompetensi yang dimilikinya. Sudah cukup banyak peranan penting yang pernah dan dipegang oleh kaum perempuan, seperti Presiden, Gubernur, Walikota, Camat dan jabatan-jabatan penting lainnya.

Walaupun dalam sejarah dunia banyak muncul perempuan sebagai presiden diberbagai negara. Namun sejumlah orang menganggap kurang cocok jika dipimpin oleh seorang perempuan. Bahkan masyarakat tradisional perempuan ditolak untuk menjadi pemimpin.<sup>10</sup>

Imam al-Baghawi mengatakan dalam kitab *Syarhus-Sunnah* bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu harus keluar untuk berjihad dan selalu berada pada urusan atau perkara orang-orang Muslim. Sedangkan perempuan itu lemah serta tidak mampu melakukan banak urusan, karena perempuan itu kurang.<sup>11</sup>

Mengenai boleh tidaknya perempuan jadi pemimpin, dapat dipahami menurut Abu Hanifah seorang perempuan dibolehkan menjadi hakim. Ketika perempuan diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta, berarti memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan. Oleh karena itu seorang perempuan juga boleh menjadi pemimpin.<sup>12</sup>

Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, mengatakan bahwa MUI Pusat belum pernah mengeluarkan fatwa tentang larangan perempuan menjadi pemimpin. Kepemimpinan wanita baik di level pemimpin tingkat atas (imamat al udhma) ataupun tingkat bawah. Sebab, persoalan kepemimpinan perempuan termasuk masalah yang diperselisihkan diantara ulama. Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Sekalipun kelak dibahas di MUI, maka hasil akhirnya bisa dipastikan terjadi perbedaan.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2003).

<sup>10</sup> Widya Agesna, "Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam" Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 125.

<sup>11</sup> Abi Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi, *Syarhus-Sunnah*, (Darul Kitab: Amaliyah, tt), hlm. 436t.

<sup>12</sup> Imam Syawkani, *Naiul Awtar*, Darul hadis, 1426 H / 2005 M, t.t.

<sup>13</sup> "MUI tak Pernah Larang Pemimpin Wanita," *News Republika*, diakses 27 Desember 2021, <http://nasional.republika.co.id>.

Kepemimpinan dalam perspektif Islam memilih pemimpin yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, jujur, adil, serta bertanggung jawab, dan bermoral yang baik. Membawa masyarakatnya lebih baik, makmur dan sejahtera. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan keadaan masyarakatnya sehingganya pemimpin dapat mengayomi masyarakatnya dengan baik.<sup>14</sup>

### **5. Analisis Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif Siyasah Syar'iyah Di Kecamatan Metro Pusat**

Analisis merupakan kegiatan untuk penyidikan secara langsung untuk mengetahui kebenaran peristiwa. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mencari data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satu yang dapat dikelola sehingga menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari dan di putuskan untuk di ceritakan kepada orang lain. Dengan tujuan utama penelitian adalah menemukan data. Jawaban dari analisis data dapat dapat langsung dari narasumber yang merupan data primer dari penelitian ini. Dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses wawancara di lakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari obyek begitu pula dengan dokumentasi dan observasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat, Lurah, RW dan RT di Kecamatan Metro Pusat dapat di peroleh bahwa kepemimpinan dalam sistem ketatanegaraan pada pemerintahan di Kota Metro khususnya di Kecamatan Metro Pusat melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan tupoksi atau peraturan yang berlaku sesuai dengan visi misi Kecamatan Metro Pusat.

Menurut Bapak Budi Antoni salah satu warga di Kecamatan Metro Pusat yang menyatakan bahwa Pelayanan yang di berikan di Kecamatan Metro Pusat baik Camat sampai ditingkat RT sangat baik dan netral kepada masyarakat. Apalagi sekarang memakai sistim online jadi sangat cepat dalam pembuatan KTP maupun KK. Pelayanan yang diberikan sesuai jam kerja di Kecamatan Metro Pusat. Untuk RW atau RT yang sudah beberapakali menjabat sudah cukup baik dalam pelayanan yang diberikan. Namun untuk RT yang baru saya belum bisa menilai namun diharapkan bisa netral dalam memberikan pelayanan yang diharapkan masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Mukhlis Zamzami Can, "Profil Pemimpin Islam," t.t., [www.eramuslim.com](http://www.eramuslim.com).

<sup>15</sup> Bapak Budi Antoni, Wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Metro Pusat, 10 Januari 2022.

Menurut Ibu Yusriati salah satu warga di Kecamatan Metro Pusat yang menyatakan bahwa Kebijakan yang di berikan di Kecamatan Metro Pusat sudah baik. Dalam hal sosialisasi tentang Covid sering sekali dilakukan dalam pencegahannya. Pelayanan yang diberikan sudah sangat baik tidak menunggu lama dalam pembuatan surat izin mendirikan usaha dan lain sebagainya dalam pemilihan RT pun dilakukan secara demokratis sehingga kita bisa memilih sesuai dengan hati nurani kita. Namun untuk pelayanan membuat KK dan KTP tidak hanya bisa di Urus di kecamatan maupun kelurahan tetapi bisa langsung meminta surat pengantar saja dari RT/RW Kemudian langsung ke Catatan sipil Setempat agar cepat di proses.<sup>16</sup>

Adapun analisis sesuai dengan syarat-syarat pemimpin perempuan pada Pemerintahan dikecamatan Metro Pusat adalah sebagai berikut:

No.	Kriteria Pemimpin Perempuan	CAMAT	LURAH	RW	RT 3 Periode	RT 1 Periode/baru terpilih
1.	Berpengetahuan luas	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Kemampuan berpikir secara konseptual	✓	✓	✓	✓	-
3.	Kemampuan mengidentifikasi hal-hal yang strategis	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Kemampuan berperan selaku integrator	✓	✓	✓	✓	-
5.	Obyektif dalam menghadapi dan memperlakukan bawahan,	✓	✓	✓	✓	-
6.	Cara bertindak dan berpikir rasional	✓	✓	✓	✓	-
7.	Pola dan gaya hidup yang dapat dijadikan teladan	✓	✓	✓	✓	✓

<sup>16</sup> Ibu Yusriati, Wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Metro Pusat, 10 Januari 2022.

8.	Keterbukaan terhadap bawahan, tanpa melupakan adanya hirarki yang berlaku	✓	✓	✓	✓	-
9.	Gaya kepemimpinan yang demokratis	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Kemampuan berperan selaku penasihat yang bijaksana	✓	✓	✓	✓	✓

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kepemimpinan perempuan di Kecamatan Metro Pusat dari kepemimpinan Camat, Lurah dan RT sudah mencakup kriteria-kriteria Pemimpin perempuan. Namun dalam konsep menguasai tupoksi untuk RT yang baru terpilih di perlukan sosialisasi dari Pemerintah untuk mengetahui fungsi kerjanya agar bisa melayani masyarakat dengan baik.

Adapun kesimpulan yang dapat diuraikan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif *Siyasah Syariyyah* di Kecamatan Metro Pusat mempunyai peran kewenangan kuasa dimana setiap pemimpin yang menjabat harus mengetahui tugasnya masing-masing sebagai pemimpin. Kebijakan-kebijakan politik hukum yang mencakup disini adalah untuk kemaslahatan umat di Kecamatan Metro Pusat. Pemerintahan yang baik atau (*good government*) untuk menjalankan pemerintahan dengan melayani kepentingan rakyat serta bertugas atau berhak menjalankan roda pemerintahan dengan peraturan perundangan serta peraturan lainnya untuk mengatur rakyat dengan tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat. Kekuasaan yang diberikan tersebut merupakan tugas untuk mengatur dan pelaksanaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta melakukan kebijakan bagi masyarakat.

Dalam mewujudkan Kebijakan dan pelayanan yang baik untuk masyarakat harus sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Berkaitan dengan kebijakan maupun pelayanan yang diberikan oleh pemimpin dan pegawai yang baik memiliki koordinasi kerja yang mendukung demi terciptanya keefisien dalam memimpin masyarakat di Daerah. Kebijakan dan arah kebijakan untuk mencapai visi misi Kecamatan Metro Pusat tahun 2016-2021.

Kepemimpinan di Kecamatan Metro Pusat mempunyai jiwa yang religius dan profesional dalam melaksanakan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan sehingga

kebijakan yang di jalankan bisa tercapai dengan baik. Dalam meningkatkan kinerja kepemimpinan di Kecamatan Metro Pusat harus mengedepankan pentingnya Koordinasi dalam kepemimpinan di butuhkan karena adanya koordinasi terjalinnya komunikasi yang baik antara kepemimpinan Camat, Lurah, RW dan RT.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penelitian maka dapat di ambil beberapa kesimpulan teori kepemimpinan, kepemimpinan Camat Metro Pusat sesuai dengan teori kepemimpinan yaitu dengan Menjadikan masyarakat kecamatan Metro Pusat sebagai masyarakat intelek dalam artian dalam setiap langkah senantiasa berpikir dan bertindak sesuai dengan aturan dan norma yang ada untuk mewujudkan Kota Metro sebagai Kota pendidikan yang sesungguhnya. Kemampuan pemerintah khususnya memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat dan menjalankan roda organisasi dengan bawahan tetap sesuai aturan yang telah berlaku. Dalam menjalankan kepemimpinan juga harus memiliki kemampuan kompetensi dan integritas yang baik. Dalam kepemimpinan Camat dalam membuat peraturan harus mengikuti Pemerintah Pusat. Apabila ada peraturan yang harus disosialisasikan maka disosialisasikan lewat media dan diteruskan pada lurah di masing-masing kelurahan. Sepanjang apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas maka dapat menyatakan bahwa Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif *Siyasah Syariyyah* mempunyai peran dan tujuan dalam melakukan kebijakan politik untuk kemaslahatan umat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abi Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi, Syarhus-Sunnah, Darul Kitab Amaliyah, , t.t.*
- Bahansi, Ahmad Fathi, Al-Siyasah al-jinaiyah fi al-syariat al-Islamiyah, Dar al-'Arubah, t.t.*
- Djazuli, Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2003.*
- Farkhani, Hukum Tata Negara, Solo: Pustaka iltizam, 2016.*
- Ibn Taymiyah, Al-siyasah al syar'iyah fi ashalah al-Ra'y wa Ra'iy, Dar al-kitab al-'Arabi, Mesir, tt., 4., t.t.*
- Imam Syawkani, Naiul Awtar, Darul hadis, 2005*

**Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara**

Vol. 02, No. 2, Juli-Desember 2022, pp. 135-146

E-ISSN: 2988-5299, DOI: [10.32332/siyasah.v4i1](https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1)

---

*Widya Agesna, "Kedudukan Pemimpin Perempuan dalam perspektif Hukum Islam, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam" Vol. 3, No. 1 (2018)*